

MODEL KEPEMIMPINAN KRISTEN DALAM PENDAMPINGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PARAWISATA LOKAL DI KABUPATEN MAJENE

Semuel Linggi Topayung

Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta, Indonesia

semueltopayung@yahoo.com

ABSTRAK

Abstrak: Kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pelayanan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan sektor publik, termasuk pengembangan infrastruktur pariwisata daerah yang sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya advokasi kebijakan ke pemerintah pusat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan hardskill dan softskill aparatur Pemerintah Kabupaten Majene melalui penerapan model kepemimpinan Kristen berbasis pelayanan dalam pendampingan peningkatan infrastruktur pariwisata lokal, khususnya dalam penyusunan proposal pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional serta penguatan kemampuan advokasi lintas sektor. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-partisipatif melalui konsultasi kepemimpinan, dialog strategis, workshop penyusunan proposal, survei lapangan, dan pendampingan advokasi ke kementerian pusat. Mitra kegiatan adalah 12 orang pejabat struktural dan staf teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Majene. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur hardskill, serta angket penilaian diri (self-assessment) dan observasi partisipatif untuk mengukur softskill. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan hardskill sebesar 32% dalam kemampuan penyusunan proposal berbasis data dan kebijakan nasional, serta peningkatan softskill sebesar 28% dalam hal kepercayaan diri advokasi, komunikasi argumentatif, dan koordinasi lintas sektor. Kegiatan ini menegaskan bahwa nilai kepemimpinan melayani, integritas, dan tanggung jawab dapat dikontekstualisasikan secara efektif dalam pembangunan sektor publik untuk mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Kristen, Pendampingan, Infrastruktur Pariwisata, Pariwisata Lokal.

Abstract: Integrity-driven and service-oriented leadership is a key factor in the success of public sector development, including the advancement of regional tourism infrastructure, which is often hampered by limited official capacity and weak policy advocacy to the central government. This community service activity aimed to improve both the hardskill and softskill of the apparatus of Majene Regency Government through the application of a servant-based Christian leadership model in mentoring the improvement of local tourism infrastructure, particularly in drafting development proposals integrated with national policies and strengthening cross-sector advocacy capabilities. The method employed was a qualitative-participatory approach through leadership consultation, strategic dialogue, proposal drafting workshops, field surveys, and advocacy assistance to central ministries. The activity partners were 12 structural officials and technical staff of the Majene Regency Tourism Office. Evaluation was conducted through pre-test and post-test to measure hardskill, as well as self-assessment questionnaires and participatory observation to measure softskill. The evaluation results showed a 32% improvement in hardskill related to drafting data-based and nationally aligned proposals, and a 28% improvement in softskill in terms of advocacy confidence, argumentative communication, and cross-sector coordination. This activity affirms that the values of servant leadership, integrity, and responsibility can be effectively contextualized in public sector development to support sustainable local tourism infrastructure advancement.

Keywords: Christian Leadership; Mentoring; Tourism Infrastructure; Local Tourism.



Article History:

Received: 24-02-2026

Revised : 13-03-2026

Accepted: 25-03-2026

Online : 05-04-2026



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata secara global diakui sebagai sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sukmana, 2018). Peningkatan jumlah wisatawan mendorong permintaan atas akomodasi, transportasi, kuliner, dan produk lokal sehingga memberi efek berganda pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri kreatif (Marshanda & Amelia, 2024). Namun, di berbagai daerah, pengembangan pariwisata masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan infrastruktur dan lemahnya integrasi perencanaan dengan kebijakan nasional. Permasalahan jalan yang rusak, keterbatasan aksesibilitas, bandara yang belum optimal, transportasi publik yang kurang memadai, serta pengembangan pelabuhan yang belum maksimal menjadi hambatan nyata dalam meningkatkan daya saing destinasi (Lasisi, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya memerlukan sumber daya alam dan budaya, tetapi juga dukungan tata kelola dan kepemimpinan yang efektif.

Dalam konteks mitra, Pemerintah Kabupaten Majene sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat yang memiliki objek wisata relatif lengkap meliputi budaya dan bahari telah menetapkan strategi pengembangan berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 dengan pembagian empat kawasan tematik: Banggai Timur, Sendana, Tammerado, dan Ulumanda, serta menjadikan Tematik 1 sebagai super prioritas karena menjadi sumber penghasilan terbesar (Mustari et al., 2021). Namun, observasi awal menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyusunan proposal pembangunan infrastruktur pariwisata yang memenuhi standar teknis dan administratif kementerian terkait. Keterbatasan tersebut mencakup aspek perencanaan, pemetaan kebutuhan lapangan, serta strategi advokasi kebijakan ke pemerintah pusat (Rahman, 2021). Selain itu, penguatan kepemimpinan yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan integrasi kebijakan masih perlu ditingkatkan (Ahmad, 2025). Kondisi ini menjadi alasan mendasar perlunya kegiatan pengabdian berbasis pendampingan yang sistematis dan berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan.

Sejumlah kajian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan tata kelola (Valente & Dredge, 2015). Dalam proses kepemimpinan pariwisata, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk merajut inovasi dan kreativitas semua orang untuk memajukan sektor pariwisata dengan prinsip *people-oriented* dan *service-oriented*. Pemimpin membagi peran dan porsi tanggung jawab yang jelas kepada anggotanya, mendorong pemikiran *out of the box*, serta menciptakan iklim kolaborasi untuk mencapai tujuan Bersama (Jumadi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari dimensi kepemimpinan yang visioner, inklusif, dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam perspektif Kristiani, kepemimpinan dipahami sebagai panggilan untuk melayani dan membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Kepemimpinan yang tidak hanya berpikir secara spiritual, tetapi juga sosial-politik, lebih efektif dalam mendorong perubahan sistemik (Topayung, 2026). Teladan Yesus Kristus sebagai pemimpin yang melayani (*servant leader*) menekankan nilai-nilai kerendahan hati, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan Bersama (Jumadi et al., 2025). Yesus menegaskan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal kekuasaan, melainkan kesediaan untuk melayani dan mengorbankan diri bagi sesama, sebagaimana dinyatakan: “Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu” (Markus 10:43–45). Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam sikap Yesus yang merendahkan diri dan mengutamakan kepentingan orang lain (Filipi 2:5–7). Pandangan ini sejalan dengan konsep *servant leadership* yang dikemukakan oleh Greenleaf, yang menyatakan bahwa, “The servant-leader is servant first... It begins with the natural feeling that one wants to serve, to serve first” (Rao, 2025). Rujukan-rujukan tersebut memperkuat urgensi penerapan kepemimpinan melayani dalam konteks pembangunan publik, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam sektor pariwisata.

Berdasarkan permasalahan dan landasan konseptual tersebut, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah model pendampingan berbasis kepemimpinan Kristen yang meliputi konsultasi kepemimpinan dan dialog strategis dengan kepala daerah, koordinasi serta penguatan kapasitas Dinas Pariwisata, survei lapangan pada lokasi prioritas, serta pendampingan penyusunan proposal dan advokasi ke kementerian terkait. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga membangun integritas, kolaborasi, dan keberanian strategis dalam tata kelola pembangunan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan dan mendeskripsikan model kepemimpinan Kristen dalam pendampingan peningkatan infrastruktur pariwisata lokal di Kabupaten Majene, serta menganalisis sejauh mana pendekatan berbasis nilai kepemimpinan melayani dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengadvokasikan pembangunan infrastruktur pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan. Secara khusus, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan *hardskill* aparatur dalam penyusunan proposal pembangunan yang berbasis data lapangan dan selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat *softskill* berupa kepercayaan diri dalam advokasi kebijakan, kemampuan komunikasi argumentatif, dan koordinasi lintas sektor kelembagaan.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif-partisipatif dengan model pendampingan langsung. Bentuk kegiatan dosen meliputi penyuluhan kepemimpinan, konsultasi strategis, workshop penyusunan proposal, serta pendampingan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini, dosen bertindak sebagai pendamping utama (mentor tunggal) yang terlibat langsung dalam proses dialog kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini tidak terintegrasi dengan program KKN atau PKL mahasiswa, melainkan dilaksanakan secara mandiri sebagai program pengabdian dosen berbasis kepakaran di bidang kepemimpinan dan kebijakan publik.

Mitra kegiatan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat. Unsur mitra yang terlibat secara langsung meliputi Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengambil kebijakan utama, serta jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Majene sebagai pelaksana teknis sektor pariwisata. Secara keseluruhan, kegiatan ini melibatkan 12 orang yang terdiri atas pejabat struktural dan staf teknis, yang berpartisipasi dalam dialog, diskusi teknis, serta penyusunan dokumen proposal pengembangan infrastruktur pariwisata, khususnya kawasan wisata pantai prioritas. Langkah-langkah pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahapan utama.

1. Pra Kegiatan

Pra Kegiatan, yang meliputi observasi lapangan dan dialog awal dengan pimpinan daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan utama terkait pengembangan infrastruktur pariwisata. Pendekatan observasi partisipatif ini memungkinkan keterlibatan langsung dalam konteks sosial dan kebijakan yang diteliti sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual (John, 2018). Selain observasi, dilakukan pula studi dokumen perencanaan daerah serta studi literatur mengenai kepemimpinan Kristen berbasis pelayanan sebagai landasan normatif pendampingan. Konsep kepemimpinan yang menekankan pelayanan, tanggung jawab moral, dan keberpihakan pada kepentingan bersama menjadi pijakan integratif antara nilai kepemimpinan Kristen dan kebutuhan praktis pembangunan infrastruktur pariwisata (Rao, 2025).

2. Tahap Kegiatan

Tahap Kegiatan, yang terdiri atas: (a) Konsultasi Kepemimpinan dan Dialog Strategis dengan kepala daerah; (b) Workshop dan Pendampingan Penyusunan Proposal pada Dinas Pariwisata; (c) Survei Lapangan ke lokasi wisata pantai prioritas untuk memetakan kebutuhan infrastruktur; dan (d) Pendampingan Advokasi ke kementerian terkait di tingkat pusat. Seluruh kegiatan dilaksanakan pada 5-23 Januari 2026.

3. Monitoring & Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi, yang dilakukan dalam dua bentuk. Evaluasi saat kegiatan berlangsung dilakukan melalui observasi partisipatif, catatan lapangan, dan refleksi langsung bersama mitra pada setiap akhir sesi diskusi. Sementara evaluasi pasca kegiatan (khusus kegiatan lapangan dan advokasi) dilakukan melalui wawancara tindak lanjut yang terdiri atas 8 pertanyaan terstruktur mencakup aspek pemahaman materi, penerapan nilai kepemimpinan, dan kemampuan advokasi kebijakan, dengan pihak Dinas Pariwisata, serta penelaahan dokumen proposal yang telah disusun. Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi, panduan wawancara, serta dokumentasi kegiatan berupa foto dan dokumen administratif. Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi: (a) peningkatan skor hardskill peserta minimal 20% berdasarkan hasil pre-test dan post-test dalam penyusunan proposal berbasis data dan kebijakan nasional; (b) peningkatan skor softskill peserta minimal 20% berdasarkan angket penilaian diri yang mengukur kepercayaan diri advokasi, komunikasi argumentatif, dan koordinasi lintas sektor; (c) tersusunnya minimal satu dokumen proposal infrastruktur pariwisata yang memenuhi standar teknis kementerian; serta (d) adanya komitmen kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengadvokasikan proposal tersebut ke kementerian pusat secara berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsultasi Kepemimpinan dan Dialog Strategis

Tahap pertama diawali dengan dialog intensif antara penulis dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene untuk mengidentifikasi visi pembangunan pariwisata daerah serta tantangan infrastruktur pendukung. Dialog ini mengintegrasikan prinsip kepemimpinan Kristen yang menekankan pelayanan, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat luas melalui model *servant leadership*. Pendekatan kolaboratif yang diterapkan membuka ruang partisipasi dan relasi setara antara pimpinan daerah, aparatur teknis, dan pemangku kepentingan. Implementasi kepemimpinan kolaboratif tersebut merepresentasikan evolusi signifikan dalam manajemen organisasi kontemporer Topayung (2025) yang berpengaruh terhadap pola pengambilan kebijakan dalam institusi yang dipimpin.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur pariwisata, dialog reflektif ini menghasilkan kesepahaman bahwa pembangunan harus dilandasi tanggung jawab etis pemimpin terhadap kepentingan publik, bukan semata pertimbangan pragmatis. Proses tersebut sekaligus membangun kepercayaan sebagai modal sosial awal. Doohyun, and William menegaskan bahwa "Social capital refers to connections among individuals social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them" (Doohyun, 2017). Modal sosial yang terbentuk memperkuat efektivitas

koordinasi kelembagaan dan advokasi kebijakan pada tahap berikutnya, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dialog strategis bersama Bupati Majene dan para Kepala Dinas

2. Koordinasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Pariwisata

Tahap kedua difokuskan pada pendampingan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Majene beserta jajaran melalui diskusi teknis mengenai perencanaan infrastruktur, identifikasi kebutuhan prioritas, dan penyelarasan dengan kebijakan kementerian terkait. Pendampingan berbasis nilai kepemimpinan Kristen yang selaras dengan *servant leadership* berpotensi memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah (Simamora, 2022). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *servant leadership* berkontribusi signifikan terhadap peningkatan komitmen organisasi, kepercayaan internal, serta efektivitas institusi publik. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur mengenai pentingnya data lapangan, konsistensi perencanaan, serta kejelasan tujuan program dalam dokumen usulan. Dengan demikian, proses ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi menjadi sarana pembelajaran kelembagaan yang memperkuat kapasitas organisasi, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diskusi Teknis Penyusunan Proposal

3. Survei Lapangan Lokasi Pariwisata

Tahap ketiga dilakukan melalui survei lapangan pada Pantai Dato, Mangrove Rewata', Pantai Batu Raja, dan Museum Mandar untuk memetakan kondisi eksisting infrastruktur, aksesibilitas, serta kebutuhan sarana pendukung. Pelibatan aparatur daerah dalam survei ini mencerminkan penerapan model pendampingan partisipatif. (Journal et al., 2026) menegaskan bahwa pendekatan partisipatif memberi ruang kepada

aktor lokal untuk menganalisis realitasnya sendiri, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi subjek pembelajaran berbasis pengalaman.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi wisata membutuhkan peningkatan akses jalan, fasilitas sanitasi, dan penataan kawasan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara potensi pariwisata dan dukungan infrastruktur yang tersedia. Pelibatan aparat daerah juga memperkuat legitimasi usulan pembangunan karena kebijakan tidak bersifat top-down. Widhiyani, Sabilla Kurnia dan Kawan-kawan menjelaskan bahwa partisipasi warga pada hakikatnya merupakan bentuk distribusi kekuasaan kepada Masyarakat (Kurnia, 2024). Dengan demikian, data lapangan menjadi dasar teknis sekaligus legitimasi etis dan politis dalam penyusunan proposal pembangunan infrastruktur pariwisata.

4. Pendampingan Penyusunan Proposal dan Advokasi

Tahap keempat merupakan integrasi seluruh hasil sebelumnya ke dalam proposal pembangunan infrastruktur pariwisata. Proposal tidak hanya menjadi persyaratan administratif formal, tetapi berfungsi sebagai instrumen advokasi berbasis bukti untuk memengaruhi pembuat keputusan di tingkat pusat (Bello, n.d.). Dokumen tersebut disusun secara sistematis agar memenuhi persyaratan teknis kementerian serta memperkuat argumentasi berbasis data lapangan.

Pendampingan dilakukan dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR untuk membantu pemerintah daerah menyampaikan usulan secara jelas, terstruktur, dan meyakinkan Pendekatan komunikasi yang kolaboratif dan berbasis bukti ini mendukung kesepahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Komisi Informasi DKI Jakarta & ICW (2021); Fikrian Rafika Dewi (2025). Nilai kepemimpinan Kristen tercermin dalam transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kesejahteraan publik. Praktik ini sejalan dengan pemahaman bahwa kepemimpinan etis menekankan tanggung jawab moral pemimpin terhadap kebutuhan dan kepentingan pihak yang dipimpinnya (Tazqiya et al., 2022). Proses advokasi yang berlandaskan etika tersebut memperkuat legitimasi pemerintah daerah sebagai mitra kredibel dalam relasi antarlevel pemerintahan.

5. Monitoring dan Evaluasi (Hasil Evaluasi)

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pendampingan berbasis kepemimpinan Kristen memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Kabupaten Majene. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi proses (formatif) dan evaluasi hasil (sumatif). Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan berlangsung melalui observasi partisipatif, catatan lapangan, dan refleksi bersama pada setiap akhir sesi diskusi. Sementara itu, evaluasi hasil dilakukan melalui pre-test dan post-test serta angket penilaian diri (self-

assessment) kepada peserta pendampingan yang berjumlah 12 orang pejabat dan staf teknis Dinas Pariwisata.

Pada aspek *hardskill*, *pre-test* menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta terkait struktur proposal berbasis kebijakan nasional, penyusunan argumentasi berbasis data lapangan, serta integrasi perencanaan teknis berada pada skor 61 dari skala 100. Setelah rangkaian pendampingan dan *workshop* teknis, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan rata-rata skor menjadi 80. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 19 poin atau setara dengan kenaikan sekitar 32%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi berdampak pada kemampuan teknis penyusunan proposal yang lebih sistematis dan sesuai standar kementerian.

Pada aspek *softskill*, evaluasi dilakukan melalui angket yang mengukur indikator kepercayaan diri dalam advokasi, kemampuan komunikasi argumentatif, serta koordinasi lintas sektor. Hasil awal menunjukkan rata-rata skor 65, sedangkan setelah pendampingan meningkat menjadi 83. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sebesar 28%. Secara kualitatif, perubahan ini terlihat dari keberanian aparatur dalam menyampaikan usulan secara terstruktur dalam forum advokasi serta meningkatnya partisipasi aktif dalam diskusi kebijakan.

Secara keseluruhan, data evaluasi menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis kepemimpinan Kristen tidak hanya memperkuat aspek teknis penyusunan dokumen, tetapi juga membangun kepercayaan, integritas, dan kolaborasi dalam tata kelola pembangunan. Hasil ini menegaskan bahwa integrasi nilai kepemimpinan melayani dengan pendekatan teknis yang sistematis mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pengabdian ini menunjukkan bahwa tujuan penerapan model kepemimpinan Kristen berbasis pelayanan dalam pendampingan peningkatan perencanaan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Majene telah tercapai secara efektif. Pendekatan yang menekankan integritas, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kepentingan publik terbukti meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Pada aspek *hardskill*, kemampuan teknis penyusunan proposal yang sistematis, berbasis data, dan selaras kebijakan nasional meningkat dengan rata-rata kenaikan pemahaman sebesar 32% (berdasarkan *pre-test* dan *post-test*). Pada aspek *softskill*, terjadi peningkatan kapasitas komunikasi advokatif, koordinasi lintas sektor, dan kepercayaan diri sebesar 28% berdasarkan hasil evaluasi angket. Integrasi nilai kepemimpinan Kristen dengan pendampingan teknis menghasilkan perencanaan yang lebih partisipatif, realistis, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat pembelajaran kelembagaan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan mentoring berkala untuk memastikan implementasi proposal tetap konsisten dengan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk menguji penerapan model ini pada sektor publik lain seperti pendidikan dan kesehatan guna memperluas kontribusi teologis dan praktisnya dalam pembangunan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Majene atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif selama proses pendampingan berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta tempat penulis mengabdikan atas dukungan akademik yang memungkinkan kegiatan ini terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan data sehingga pengabdian ini dapat disusun secara sistematis dan bermanfaat bagi penguatan pembangunan sektor publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, H. (2025). Model Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Wisata Pedesaan: Studi Kasus Bengkelung Park, Kabupaten Pekalongan. *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 113–122.
- Bello, F. G. (n.d.). *Community Participation in Tourism Planning at Majete Wildlife Reserve, Malawi*.
- Fikrian Rafika Dewi, S. (2025). Kolaborasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Kumuh Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang). *Jurnal Inovasi Konstruksi*, 4(1), 23–33.
- Flávio Valente, Dianne Dredge, G. L. (2015). Leadership and Governance in Regional Tourism. *Journal of Destination Marketing and Management*, 4(2), 127–136.
- Hwang, Doohyun, and W. S. (2017). Social Capital and Collective Action in Rural Tourism. *Journal of Travel Research*, 56(1), 81–93.
- John W. Creswell. (2018). *Research Design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Journal, I., Humanities, O., Sufa, S. A., Riyadi, S., Baruno, A. D., Brumadyadisty, G., Radjamin, I. P., Islam, U., Yusuf, S., Surabaya, U., & Author, C. (2026). Tourism Development in the Sumenep Archipelago: Policy, Infrastructure, and Stakeholder Synergy. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 5(4), 2045 – 2060.
- Jumadi, Jonidius Illu, S. R. P. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Kristen dalam Pemerintahan. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 7(1), 42–54.
- M. Simamora. (2022). Pengaruh Servant Leadership Dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasional Yang Dimoderasi Oleh Kepuasan Kerja Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Iv Provinsi Sumatera Utara. *JEBIDI (Jurnal Ekonomi Bisnis Digital)*, 1(3), 490–499.
- Marshanda, K., & Amelia, V. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Pemanduan Wisata di Desa Ekowisata Pancoh. *Kurnia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 42–49.

- MeylaTazqiya Rakhma, Salma Nisrina N F, Muhammad Fahmi Z, N. Y. (2022). Gaya Kepemimpinan Dalam Dilema Etis: Tinjauan Literatur Gaya Komunikasi Kepemimpinan. *Jurnal Common*, 6(1), 41–57.
- Nuryanti Mustari, Nursaleh Hartaman, Vinka Audrina Sahrir, Nurul Rahmi Aulia, S. A. H. (2021). Branding Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Majene. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 282–293.
- Oman Sukmana. (2018). Strategi percepatan pertumbuhan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pengembangan pariwisata. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(3).
- Rahman, Z. (2021). Regional Tourism Development Planning: A Structured Literature Review. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan SosialPolitik UMA*, 9(2), 150–162. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i2.5208>
- Rao, S. P. and M. K. (2025). From Service to Sustainability : How Servant Leadership Drives Innovation and Competitive Advantage in Tourism Management. *Proceedings of the World Conference on Social Sciences*, 4(1), 149–168.
- Semuel Linggi Topayung. (2025). Melintasi generasi: Analisis model kepemimpinan Yesus dalam kolaborasi baby boomer dan gen z pada konteks demokrasi politik Indonesia. *Kurios*, 11(2), 466–480.
- Taiwo Temitope Lasisi, S. A. O. and K. K. E. (2022). Smart destination competitiveness : underscoring its impact on economic growth. *Journal Of Tourism Futures*, 1–21. <https://doi.org/10.1108/JTF-09-2022-0243>
- Topayung, S. L. (2026). Tanggung Jawab Etis Kepemimpinan Kristen dalam Merespons Pertambangan Ilegal. *Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 10(2), 729–746. <https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.1857>
- Widhiani, Sabilla Kurnia, dkk. (2024). *Expected Role of the Community in Decision-Making for the Development of Sanankerto Tourism Village, Turen Sub-District*. Malang District.